

# Mitigasi Kebakaran melalui Masyarakat

## Fire Mitigation through Community Volunteering

Yusran Nasution

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

### Abstrak

Upaya dini pencegahan kebakaran telah mampu menurunkan risiko kecelakaan di lingkungan permukiman padat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam mitigasi kebakaran, menilai bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran di masyarakat dan mengembangkan model berbasis masyarakat dalam mitigasi kebakaran. Kelompok diskusi terarah dilakukan pada 130 informan yang terdiri dari unsur-unsur rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, perlindungan masyarakat atau pertahanan sipil, tokoh masyarakat, dewan kelurahan, karang taruna, dan anggota barisan sukarelawan kebakaran (Balakar). Seluruh informan menilai bahwa masyarakat perlu memiliki tujuan bersama dan motivasi yang kuat untuk mencegah kebakaran guna menurunkan risiko kebakaran serta mencegah dan meminimalkan korban. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang telah dilakukan dalam mencegah kebakaran adalah saling mengingatkan warga lain tentang bahaya kebakaran, remaja dan hansip mengikuti pelatihan Balakar di kelurahan dan setelah pelatihan mempersiapkan kelompok remaja sebagai pelopor yang bergerak memadamkan api saat terjadi kebakaran, serta mempraktekkan perilaku aman saat menggunakan peralatan listrik dan kompor di rumah. Namun demikian, informan belum memiliki suatu model berbasis masyarakat yang khusus menangani kebakaran, kecuali Balakar. Melalui pengembangan model berbasis komunitas ini diharapkan kejadian kebakaran dapat diminimalisir sehingga kejadian kebakaran tidak meningkat pada masa mendatang.

**Kata kunci:** Mitigasi kebakaran, masyarakat, pengendalian kebakaran, anggota balakar

### Abstract

The efforts on fire prevention and early fire fighting can reduce fire risk mainly in urban slum area. The research objectives were to identify needs community on fire mitigation, to assess types of fire controlling in community, and to develop community-based model in fire mitigation. Focus group

discussions were conducted in 130 informants consisted of *RT, RW, PKK, linmas/hansip*, community leaders, *dewan kelurahan*, youth organization, and balakar members. All informants considered that community should have the similar objective and strong motivation on fire prevention to reduce fire cases, and also to minimize the number of victims. There were a lot of types of preventive efforts on fire cases i.e. reminding other people on fire dangers, youth people and security staffs involved in balakar training at village office, and practicing safe behavior when using electrical tools/kits and stove at home. However, some informants said that they had no specific other community based model on fire prevention, except balakar. By developing community based model, it can reduce fire cases in order not to increase anymore in future.

**Key words:** Fire mitigation, community, fire controlling, balakar member

### Pendahuluan

Kebakaran di permukiman merupakan masalah kronik yang sulit dicegah. Di permukiman padat, kebakaran cenderung meningkat. Di DKI Jakarta misalnya, dalam tahun 2011 terjadi 948 kasus kebakaran dengan jumlah korban jiwa mencapai 18 orang. Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah kebakaran ini meningkat 26% dan jumlah korban jiwa meningkat pula.<sup>1</sup> Mitigasi kesiapsiagaan kebakaran dibutuhkan untuk mencegah atau meminimalkan potensi dampak kebakaran. Untuk eliminasi risiko kebakaran pada populasi yang rentan, diperlukan perencanaan program-program mitigasi dan kesiapsiagaan. Lingkup mitigasi meliputi eliminasi risiko, reduksi risiko, dan transmisi tanggung jawab.<sup>2</sup> Miti-

Alamat Korespondensi: Yusran Nasution, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Kampus Baru UI Depok 16424, Hp. 08129107180, e-mail: yus\_r4n@yahoo.com

gasi difokuskan untuk menghilangkan atau membatasi kemungkinan terjadinya bencana dan menurunkan tingkat kerentanan populasi. Salah satu cara untuk menurunkan kerentanan populasi adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Kesiapsiagaan mencakup kemampuan untuk merespons ancaman dan dampak bencana secara efektif dan memulihkan dampak jangka panjangnya dengan cepat.

Dalam kesiapsiagaan terhadap bencana ini, partisipasi aktif masyarakat memainkan peran yang paling penting. Idealnya, kegiatan penanggulangan bencana yang efektif harus melalui tiga tahap.<sup>2</sup> Pertama, pencegahan atau mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana. Kedua, penyelamatan pada saat terjadi bencana. Ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana. Kenyataannya, penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigma penanganan bencana yang parsial, sektoral, dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah sebatas pemberian bantuan fisik dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan.

Pada mitigasi bencana ini, tahun 2008 telah dilakukan studi pendahuluan di DKI Jakarta yang menganalisis peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kebakaran.<sup>3</sup> Studi ini menemukan bahwa peran LSM dan organisasi pemerhati kebakaran dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kebakaran masih rendah. Pada umumnya kiprah mereka lebih banyak ditekankan pada upaya-upaya tanggap darurat berupa upaya-upaya pemulihan dan rekonstruksi lingkungan dan korban bencana kebakaran. Akan tetapi, sudah ada satu upaya pengembangan kemandirian masyarakat dalam bencana kebakaran melalui kegiatan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL). Instrumen utama SKKL adalah pembentukan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dengan anggota dan pengurus dari masyarakat setempat.<sup>4,5</sup> Sayangnya, pembentukan Balakar belum berjalan serentak di seluruh kelurahan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) karena masih minimnya upaya sosialisasi ini oleh dinas pemadam kebakaran di tingkat propinsi. Merujuk alasan ini, maka dibutuhkan suatu studi eksplorasi pengembangan model pemberdayaan masyarakat selain Balakar dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kebakaran di wilayah Jabodetabek. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam mitigasi kebakaran, menilai bentuk-bentuk penanggulangan kebakaran di masyarakat, dan mengembangkan model berbasis masyarakat dalam mitigasi kebakaran.

## Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

teknik diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*, FGD). Tiga belas kelompok FGD dibentuk melibatkan 130 orang informan yang terdiri dari pengurus pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), ibu rukun warga (RW), ibu rukun tetangga (RT), ketua RW, tokoh masyarakat, warga biasa, dewan kelurahan, anggota Balakar, perlindungan masyarakat (linmas) atau pertahanan sipil (hansip), dan karang taruna di dua RW terpilih secara *purposive* di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. FGD dilakukan 13 kali selama bulan Oktober hingga November 2009 dengan jumlah 8-10 informan per FGD. Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai informan disajikan dalam bentuk matriks tema utama (*major theme matrix*). Data dan informasi yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Sesegera mungkin informasi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis tanpa menunggu kegiatan FGD selesai.

## Hasil

Informan rata-rata berusia 40 – 50 tahun dengan pendidikan akhir SLTA. Informan laki-laki umumnya bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan perempuan tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga (IRT). Beberapa cara yang dilakukan masyarakat dalam mencegah kebakaran adalah saling mengingatkan bahaya kebakaran, mengikutsertakan remaja dan hansip dalam pelatihan Balakar di kelurahan, mempersiapkan kelompok remaja sebagai pelopor yang bergerak memadamkan api, serta mempraktikkan perilaku aman saat menggunakan peralatan listrik dan kompor di rumah. Semua kelompok masyarakat baik ibu-ibu, remaja atau pemuda, bapak-bapak, tokoh masyarakat, RT, dan RW perlu terlibat dalam usaha pencegahan kebakaran untuk kepentingan bersama. Upaya itu perlu dipantau oleh mitra terkait dari aparat kelurahan, kecamatan, suku dinas pemadam kebakaran (Sudin PK), dan dinas pemadam kebakaran untuk memudahkan koordinasi dan saling mengingatkan jika terdapat kesalahan.

Berdasarkan hasil FGD, seluruh informan menganggap masyarakat perlu memiliki tujuan bersama dan cara-cara mencegah kebakaran. Hal itu disebabkan besarnya risiko korban jiwa dan harta benda di wilayah permukiman padat. Untuk mencegah dan meminimalkan korban, gotong royong harus digalang dan motivasi kuat untuk kepentingan bersama perlu dimiliki karena dapat menentukan perilaku individu menjadi tenang ketika menghadapi kebakaran.

Disamping itu, mayoritas informan telah melakukan beberapa upaya penanggulangan kebakaran secara spontan dan terencana seperti menggunakan listrik secara tepat dan aman serta mengikuti simulasi dan pelatihan pemadaman kebakaran dan Balakar. Ada beberapa cara menyiarkan berita kebakaran ke warga lainnya antara

lain dengan teriakan, telepon, pengeras suara di masjid, dan memukul kentongan atau tiang listrik. Mereka menilai cara-cara tersebut cukup efektif, namun tidak dapat menentukan langkah kerjanya secara tepat karena belum pernah menetapkan prosedur kerja pencegahan kebakaran secara tertulis. Di antara cara-cara tersebut, memukul kentongan dan tiang listrik dinilai paling efektif karena masyarakat mengetahui makna atau kode-kode bunyinya.

Tugas khusus seperti evakuasi korban tidak spesifik dilakukan oleh masyarakat karena secara refleksi dan spontan sudah dilakukan. Akan tetapi, hal itu belum pernah dibicarakan sebelumnya antara warga sendiri karena tindakan penyelamatan ketika kebakaran dilakukan tanpa rencana. Mereka melakukan apa yang bisa dilakukan pertama kali, kecuali informan dari kelurahan yang telah mengalami peristiwa kebakaran sebanyak 5 kali. Mereka mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran di kelurahan sehingga mengetahui hal yang harus dilakukan serta tugas-tugas khusus saat kebakaran. Biasanya orang yang mengevakuasi harus menggunakan seragam atau atribut Balakar karena jika tidak dapat menimbulkan kecurigaan. *Smart alarm*, alat pemadam api ringan (APAR), karung, dan pompa *portable* adalah alat proteksi kebakaran yang dimiliki oleh seluruh informan saat ini, kecuali informan dari Kelurahan Poltangan, Pejaten Timur. Alat tersebut diberikan oleh suku dinas pemadam kebakaran ke RT, RW, kelurahan dan disimpan di masing-masing penerima. Mayoritas informan tidak memiliki cara khusus untuk mencegah kebakaran yang berbasis masyarakat. Biasanya mereka hanya melakukan penyuluhan dan saling mengingatkan saja. Akan tetapi, informan dari Kelurahan Kamal Muara mempunyai model Balakar untuk penanggulangan kebakaran.

Hampir seluruh informan pernah mendengar istilah Balakar dengan bermacam-macam definisi atau kepanjangannya antara lain badan antisipasi kebakaran, balai pelatihan kebakaran, bahaya penanggulangan kebakaran, bantuan langsung kebakaran, barisan pemadam kebakaran, dan bantuan barisan laskar pemadam kebakaran. Sebagian kecil informan mengatakan bahwa tugas pokok Balakar adalah berpatroli keliling kampung yang selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan, melakukan penanggulangan bencana dari teknis pemadaman api hingga penanganan korban, dan melakukan pemadaman awal sebelum petugas datang ke lokasi kebakaran. Sumber pertama informan tentang istilah Balakar adalah suami informan, Sudin PK, pengurus RT, media massa, kegiatan di kelurahan, dan salah satu anggota keluarga yang pernah mengikuti pelatihan Balakar. Informan lain yang tahu Balakar pernah berpartisipasi dalam pelatihan Balakar. Hanya sebagian kecil informan mengetahui telah terbentuk Balakar di wilayah tinggalnya sejak tahun 2008 lalu. Ada pula kelurahan yang memiliki Balakar, tetapi

sudah mati karena pesertanya tidak aktif lagi akibat sibuk mencari nafkah sebagai nelayan. Kelurahan Kramat dan Galur telah memiliki organisasi Balakar kurang lebih sejak 10 tahun lalu, tetapi sekarang di Kelurahan Kramat (anggotanya adalah ibu-ibu PKK) sudah tidak aktif lagi karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat. Sementara itu, di Kelurahan Galur saat ini pelatihan Balakar sudah tidak dilakukan lagi saat ini, kecuali pembinaan anggota setiap 3 – 4 bulan melalui penyuluhan.

Hampir seluruh informan tidak tahu dasar hukum pembentukan Balakar, kecuali informan dari Kelurahan Poltangan yang dapat menyebutkannya meskipun tidak tepat yaitu surat keputusan gubernur, keputusan menteri pekerjaan umum, dan surat tugas walikota. Mereka pun tidak tahu kewajiban pemerintah untuk menyediakan dana kegiatan Balakar. Seorang informan lain dari kelurahan yang berbeda mengaku tidak tahu secara pasti peraturan tentang Balakar. Menurut sebagian besar informan, implementasi Balakar memiliki beberapa kendala yaitu sulit meminta komitmen peserta karena sibuk mencari nafkah, sulit mengajak masyarakat pendatang menjadi anggota, tidak semua anggota bisa berkumpul saat terjadi kebakaran, tidak tersedianya alat komunikasi antar-anggota, anggota belum memiliki atribut sehingga menyulitkan turun di wilayah lain, dan kurangnya komunikasi dan sosialisasi ke warga. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya, yaitu mengajak kaum ibu untuk mengikuti pelatihan Balakar, menyediakan anggota cadangan untuk menggantikan anggota lain yang bekerja di luar rumah sehingga tidak dapat bertugas saat kebakaran, berdialog dengan suku dinas pemadam kebakaran, dinas pemadam kebakaran, hingga ke gubernur meskipun belum ditanggapi dan tetap melakukan komunikasi ke seluruh anggota pas-capelatihan.

Seluruh informan tidak mengetahui bila kantor kelurahan mempunyai modul pelatihan dan pedoman petunjuk teknis Balakar tanpa sebab-sebab yang jelas. Akan tetapi mereka mengetahui bahwa materi pelatihan Balakar adalah pemadaman api dan evakuasi korban kebakaran. Informan yang berasal dari kelurahan yang telah memiliki Balakar menyebutkan waktu terbentuknya sejak tahun 2008/2009 dengan peserta diambil dari wakil RW per kelurahan.

Semua informan menganggap masyarakat perlu melakukan tindakan mitigasi kebakaran karena lingkungan permukiman yang padat, untuk kepentingan masyarakat sendiri, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar, dan masyarakat selalu tanggap dan waspada. Menurut mereka, tindakan mitigasi yang dilakukan adalah penyuluhan bahaya kebakaran pelatihan pemadaman api. Seluruh informan dari Kelurahan Cengkareng Timur belum melakukannya sehingga tidak

mengetahui kegiatan mitigasi tersebut. Hanya informan dari Kelurahan Bukit Duri yang mengatakan satuan tugas (satgas) sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk kebakaran dengan tugas melakukan evakuasi korban dan menyelenggarakan dapur umum. Sebagian besar informan tidak menyebutkan bentuk organisasi/kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kebakaran disertai alasannya, kecuali informan dari Kelurahan Poltangan yang sedang merintis ke arah sana dan siap membentuknya bila sumber daya manusia dan peralatannya telah tersedia. Menurut sebagian besar informan, menyelamatkan nyawa korban, melindungi, dan memberikan komando saat terjadi kebakaran merupakan tugas-tugas mereka yang terlibat dalam satgas di Kelurahan Bukit Duri. Keterlibatannya dalam organisasi ini disebabkan oleh rasa kepedulian, gotong royong, dan bentuk pengabdian. Ia tidak menduduki jabatan tertentu karena hal yang dapat dikerjakan akan dilakukan lebih dulu.

Ketika ditanyakan perlu tidaknya kelurahan meresmikan suatu model berbasis masyarakat dalam penanggulangan kebakaran bila kelak akan diadakan di wilayah tinggal informan, kebanyakan informan menyatakan tidak tahu karena belum ada organisasinya sehingga tidak bisa dibayangkan. Namun demikian, informan dari Kelurahan Kramat mengusulkan untuk memberdayakan remaja sebagai kelompok pemadam dini saat kebakaran dengan memakai sistem ronda. Tiap RT dapat mengirimkan satu orang remaja sebagai perwakilan. Tiap minggu kelompok remaja ini meronda rumah-rumah dari risiko bahaya kebakaran. Kepada mereka diberikan pakaian seragam khusus seperti Balakar dan insentif hasil swadaya masyarakat misalnya iuran Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kepala keluarga.

Seluruh informan bersedia untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan yang menangani kebakaran bila dibentuk kelak. Mereka menjadi relawan atau bentuk lain apapun sepanjang kegiatannya searah dengan Balakar. Kesediaan itu disebabkan oleh panggilan jiwa, demi kepentingan bersama dan tinggal di masyarakat yang wajib saling membantu. Harapannya, mereka akan mendapatkan pelatihan, penyuluhan, dan praktek langsung tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran, disertai dengan pemberian peralatan pemadaman api dan kompensasi berupa uang. Kompensasi bisa diberikan bila ada dana dari pemerintah, tetapi tidak wajib ada bila tidak ada alokasi untuk honor anggota. Mereka menyarankan agar pelatihan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penanganan kebakaran diberikan sekali sebulan bagi kelompok-kelompok RT, arisan, dan pengajian.

## Pembahasan

Dalam studi ini, adanya motivasi yang kuat dibutuhkan dengan dasar adanya kebutuhan masyarakat untuk mencegah munculnya kejadian kebakaran. Motivasi

itu dibicarakan dalam keluarga, pertemuan antarwarga, dan sosialisasi sehingga perlu disusun suatu langkah kerja berupa koordinasi antara masyarakat dengan RT untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi atau himbauan terkait upaya pencegahan kebakaran.

Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku tertentu.<sup>6</sup> Motif intrinsik individu tersebut dalam berperilaku ditentukan oleh kebutuhan manusia. Pembentukan Balakar bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran secara dini. Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran menganut prinsip-prinsip penyelenggaraan program: meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan perilaku serta pengembangan keterampilan masyarakat agar masyarakat tahu, mampu dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip ini telah dilaksanakan di seluruh kelurahan tempat asal informan.

Organisasi Balakar disesuaikan dengan karakteristik daerah dan berfungsi untuk melakukan pemadaman dini sebelum dinas pemadam kebakaran datang.<sup>8</sup> Petunjuk teknis Balakar disusun berdasarkan beberapa produk hukum yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan No. 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat. Organisasi Balakar mulai dikenalkan ke masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada tahun 2001. Selain membantu tugas pemadaman kebakaran sebelum petugas dinas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran dan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah kebakaran. Hingga saat ini, Balakar telah ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW. Balakar merupakan wadah partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengatasi ancaman kebakaran. Partisipasi yang diperlukan masyarakat dalam mitigasi kesiapsiagaan kebakaran adalah masyarakat jangan hanya mengandalkan Balakar dan petugas pemadam kebakaran, tetapi harus merencanakan tindakan darurat dari dan untuk masyarakat.<sup>9</sup>

Langkah kerja yang dapat dilakukan untuk menyiarkan berita kebakaran pertama kali seperti memukul kentongan atau menggunakan cara pemberitahuan lain. Langkah selanjutnya adalah mencari sumber air dan alat pemadam api, menenangkan warga lain agar tidak panik, dan melakukan tugas khusus. Studi yang dilakukan tingkat nasional tentang pemantauan model Balakar menyatakan bahwa beberapa cara memotivasi

Balakar antara lain penyelenggaraan pelatihan bersertifikat, pemberian atribut, tanda jasa, pemberian peralatan, pembangunan posko, pembinaan lanjutan, undangan acara-acara berkaitan dengan penanggulangan kebakaran, bencana dan sejenisnya.<sup>10</sup>

Secara umum, informan menegaskan agar tidak perlu dibentuk suatu sistem pencegahan kebakaran yang baru, tetapi perlu memberdayakan sistem yang sudah ada yaitu Balakar. Temuan studi sejalan dengan penelitian pada masyarakat Kelurahan Galur tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.<sup>11</sup> Balakar dan Sistem Ketahanan Lingkungan terhadap Kebakaran sebagai penyempurnaannya dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai bentuk organisasi kebakaran lingkungan, hanya perlu peningkatan stimulasi dari dinas pemadam kebakaran dalam bentuk pembinaan terhadap organisasi yang telah terbentuk tersebut. Sejatinnya Balakar berfungsi melakukan pelatihan, simulasi dan penyuluhan bagi masyarakat tentang bahaya kebakaran, pencegahan serta cara penanggulangan kebakaran. Selain itu, Balakar membuat model yang sistematis atau berjenjang mulai dari tingkat atas dinas pemadam kebakaran, suku dinas pemadam kebakaran, ke bawah meliputi kecamatan, kelurahan, RT, RW yang berwenang melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pascakebakaran selain memperingati untuk selalu waspada terjadinya kebakaran.<sup>9</sup> Secara umum persepsi masyarakat cukup baik terhadap permasalahan kebakaran dan terhadap instansi dinas pemadam kebakaran. Hal itu didasari dari cepat tanggapnya dinas pemadam kebakaran menurunkan petugasnya ke lokasi kebakaran maksimal 15 menit.<sup>12</sup>

Informan menyatakan tidak perlu membentuk model mitigasi yang baru, sehingga tetap memberdayakan Balakar yang sudah ada. Masyarakat tidak perlu membuat organisasi atau model baru karena membuat organisasi atau model baru membutuhkan banyak dana. Hanya saja pemerintah perlu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta dalam mitigasi kesiapsiagaan kebakaran ini karena motivasi yang rendah akan memicu tidak berjalannya program ini dengan baik. Sebenarnya, Propinsi DKI Jakarta telah memiliki satu model sistem penanggulangan kebakaran permukiman padat sejak tahun 2008 yaitu Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan, dengan proyek percontohan di satu RW masing-masing wilayah di Jakarta. Kriteria wilayah yang akan diprioritaskan mengikuti program ini adalah permukiman padat, sulit akses masuk kendaraan, dan ketiadaan sarana hidran atau sumber air bila terjadi kebakaran.<sup>11</sup>

## Kesimpulan

Masyarakat menilai perlu tujuan bersama dan dorongan atau motivasi yang kuat dalam mencegah bahaya

kebakaran serta terlibat kegiatan relawan atau petugas penyuluh lapangan. Bentuk penanggulangan kebakaran yang dilakukan masyarakat meliputi pemakaian listrik yang tepat dan aman, simulasi dan pelatihan pemadam kebakaran, serta Balakar. Berita kebakaran disebarluaskan melalui teriakan, telepon, pengeras suara di masjid, memukul kentongan atau tiang listrik.

## Saran

Perlu dibentuk sistem di wilayah permukiman yang belum memiliki sistem ini dengan memberdayakan warga masyarakat setempat. Khusus di wilayah permukiman yang telah mempunyai sistem ini agar tetap memantau perkembangan kegiatan anggotanya termasuk memperhatikan tingkat kesejahteraan para anggotanya misalnya dengan memberikan insentif yang layak untuk meningkatkan motivasi kerja anggota baik dalam bentuk uang, bingkisan hari-hari besar keagamaan, ataupun seragam. Selain itu, disarankan agar tiap rumah warga memiliki satu tabung pemadam kebakaran.

## Daftar Pustaka

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data statistik kebakaran di DKI Jakarta. Jakarta: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 2011. Diunduh dari: <http://kebakaran.jakarta.go.id/>.
2. Walthur C. The disaster management cycle. 2008 [edisi 2008, diakses tanggal 22 Januari 2008]. Diunduh dari: [http://www.grdc.org/uem/disaster/1-dm\\_cycle.html](http://www.grdc.org/uem/disaster/1-dm_cycle.html)
3. Setiarini A, Fatmah, Triyanti. Peran LSM dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kebakaran di DKI Jakarta. Depok: Laporan Penelitian Studi Kualitatif, Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; 2008.
4. Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. Modul 1 konsep sistem ketahanan lingkungan terhadap bahaya kebakaran. Jakarta: Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta; 2004.
5. Masyarakat Profesi Proteksi Kebakaran Indonesia. Laporan akhir fire risk assesment masyarakat Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara. Jakarta; 2008.
6. Uno. Teori motivasi dan pengukurannya kajian dan analisis di bidang pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara; 2008.
7. Mimin K. Pemantapan model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dengan sistem BALAKAR. Bandung: Pusat Litbang Pemukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; 2005.
8. Kementerian Pekerjaan Umum. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dengan sistem BALAKAR. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum; 2010.
9. Fatmah. Model mitigasi kebakaran berbasis masyarakat: kajian kualitatif pada aparat pemerintah dan LSM. Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2009; 4 (3): 99-108.
10. Pelita. DKI kembangkan sistem penanggulangan kebakaran permukiman padat. Edisi 23 Juli 2010. Jakarta; Pelita; 2010.

11. Kristanto R. Kajian persepsi dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran (studi kasus di Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat [tesis]. Bogor: Master Manajemen Bisnis Institut Teknologi Bogor; 2009.
12. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Petunjuk teknis pemantapan model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dengan sistem BALAKAR. Bandung: Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemukiman; 2000.